



ASEAN  
INDONESIA  
2023



## Menguatkan Akuntabilitas Mendorong ASEAN Sebagai Pusat Pertumbuhan

INDONESIA MENDORONG NEGARA-NEGARA ASEAN UNTUK TETAP SOLID  
DAN TERUS MEMPERKUAT SINERGI DEMI MENJAGA STABILITAS KEAMANAN  
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN.



11 Presiden Apresiasi  
Upaya BPK Kawal  
Perbaikan Program  
Prioritas Nasional

21 Mengawal  
Arah Diplomasi  
Ekonomi  
Indonesia

40 BPK Berperan  
Sukseskan  
Visi Indonesia  
Emas 2045



## PENGARAH

Isma Yatun  
Hendra Susanto  
Nyoman Adhi Suryadnyana  
Daniel Lumban Tobing  
Achsarul Qosasi  
Haerul Saleh  
Ahmadi Noor Supit  
Pius Lustrilanang  
Slamet Edy Purnomo

## PENANGGUNG JAWAB

Bahtiar Arif

## WAKIL PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

## KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

## KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

## SEKRETARIAT

Fitri Yuliantri Permana  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Apriyana  
Sudarman

## ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id  
www.bpk.go.id

## DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/  
menerima uang/barang/fasilitas  
lainnya dari pihak yang terkait  
dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018  
tentang Kode Etik BPK)

Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk mendapat perhatian dunia di kancah internasional. Belum lama ini, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia. Kini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi Ketua ASEAN 2023.

Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui tugas dan fungsinya, turut membersamai tekad Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.

Redaksi mengangkat isu ini sebagai liputan utama karena tema yang diusung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 sangat relevan dan dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Walau ekonomi dunia sudah mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19, masih banyak tantangan lain yang tak kalah berat, mulai dari konflik geopolitik maupun ekonomi.

Di sinilah peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dibutuhkan. Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk tetap solid dan terus memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

BPK sebagai lembaga pemeriksa ikut berkontribusi untuk mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Melalui perannya di kancah global, BPK mengajak lembaga pemeriksa (SAI) dunia, termasuk ASEAN, mengawal isu-isu strategis yang diangkat dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Berbagai agenda pun digelar oleh BPK terkait dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Misal, BPK memimpin The 48th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting yang diselenggarakan pada 6 Juli 2023 melalui konferensi video. Pertemuan itu dibuka oleh Ketua BPK Isma Yatun sekaligus menjadi Ketua 48th AAC Meeting. Dalam acara tersebut, Isma menyoroti pentingnya peran AAC dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dari Sekretariat ASEAN.

BPK pun berperan menyukseskan semangat Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 melalui fungsi pemeriksaan. Isu-isu prioritas yang diangkat dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, bahkan selaras dengan strategi pemeriksaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap program-program yang dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti ekonomi digital, diplomasi ekonomi, Sustainable Development Goals, transisi energi, hingga perlindungan pekerja migran.

Peran BPK terhadap program pemerintah juga mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan Program Prioritas Nasional," ujar Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023.

Masih banyak laporan lain yang redaksi siapkan dalam edisi Agustus 2023 ini. Selamat menikmati. ~



#### 4 >> Menjadikan ASEAN Sebagai Pusat Pertumbuhan

Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk tetap solid dan terus memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.



#### 11 >> Presiden Apresiasi Upaya BPK Kawal Perbaikan Program Prioritas Nasional

Dengan kepercayaan internasional yang tinggi, kredibilitas Indonesia akan semakin diakui.



#### 14 >> BPK Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Penguatan Akuntabilitas

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya sumber daya.

- 18 >> Perbaiki Penyaluran BLT Desa
- 21 >> Mengawal Arah Diplomasi Ekonomi Indonesia
- 26 >> Optimalisasi Peningkatan Citra Positif Indonesia di Mata Dunia
- 29 >> SAO Thailand Paparkan 10 Prinsip Aturan APBN di Negaranya
- 34 >> BPK dan SAI Vietnam Sepakat Bahas Pemeriksaan Pengelolaan Sampah
- 36 >> Mengelola Konflik di Lingkungan Pekerjaan
- 40 >> BPK Berperan Sukseskan Visi Indonesia Emas 2045
- 43 >> Mencegah Konflik Moral di Tempat Kerja
- 46 >> Menggaungkan Semangat ASEAN 2023
- 50 >> Slamet Edy Purnomo Resmi Jadi Anggota BPK
- 52 >> Ketua BPK Sampaikan Pesan kepada CPNS Golongan II
- 54 >> Nyoman Adhi Suryadnyana Diambil Sumpah Sebagai Anggota MKKE dari unsur BPK
- 56 >> Visi Indonesia Emas Jadi Panduan BPK Susun Renstra 2024-2029
- 60 >> Implementasi Kebijakan Standar Audit (SA-700 Revisi 2021) dalam Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara No 1. Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- 64 >> Berita Foto



**ASEAN** INDONESIA  
2023 

MEDIA CENTER KTT KE-43 ASEAN 2023



# Menjadikan ASEAN Sebagai Pusat Pertumbuhan

INDONESIA MENDORONG NEGARA-NEGARA ASEAN UNTUK TETAP SOLID  
DAN TERUS MEMPERKUAT SINERGI DEMI MENJAGA STABILITAS KEAMANAN  
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN.

**M**eski pandemi Covid-19 telah berlalu, pekerjaan rumah untuk memulihkan perekonomian dunia belumlah usai. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang perekonomiannya lebih tangguh saat masa pandemi, memiliki peran penting untuk terus menjadi cahaya bagi ekonomi dunia.

Semangat itulah yang diusung Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui tugas dan fungsinya, turut membersamai tekad Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.

Tema ASEAN 2023 yang diusung Keketuaan Indonesia terdiri atas tiga pilar. Pilar pertama yaitu ASEAN Matters, bertujuan menjadikan ASEAN tetap relevan, mampu hadapi tantangan ke depan, serta terus menjadi motor stabilitas dan perdamaian kawasan.

Pilar kedua yaitu Epicentrum of Growth. Melalui pilar ini, Indonesia mendorong kerja sama konkret negara anggota ASEAN, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Kawasan Asia Tenggara diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

**BPK sebagai lembaga pemeriksa ikut berkontribusi untuk mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.**



ANTARA/MEDIA CENTER KTT KE-43 ASEAN 2023/ZABUR KARURU

- Presiden Joko Widodo (ketujuh kiri) berfoto bersama, dari kiri, Perdana Menteri Cook Islands Mark Brown, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Permanent Secretary of Foreign Affairs Thailand Sarun Charoensuwan, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao saat pembukaan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



■ Ketua BPK Isma Yatun dalam seminar internasional bertajuk "Leveraging the Impact of Performance Audit towards a Green Economy: Multi-Perspectives Regional, National, and International".

Adapun pilar terakhir terkait dengan Implementasi AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). AOIP adalah komitmen membangun kerja sama konkret dan inklusif dengan semua negara untuk menjadikan Indo Pasifik sebagai kawasan damai dan sejahtera.

Tema yang diusung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 sangat relevan dan dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Walau ekonomi dunia sudah mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19, masih banyak tantangan lain yang tak kalah berat. Tantangan itu mulai dari konflik geopolitik maupun ekonomi.

Tantangan datang dari persaingan negara besar serta konflik yang terjadi di Ukraina. Dari sisi ekonomi, momentum pemulihan terancam dengan adanya krisis ekonomi, pangan, dan energi.

Di sinilah peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dibutuhkan. Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk tetap solid dan terus memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas

keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Perekonomian negara-negara ASEAN terbukti lebih tangguh dibandingkan kawasan lainnya dan mampu pulih dengan cepat dari dampak pandemi. Tahun lalu, ekonomi ASEAN mampu tumbuh 5,7 persen yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi. Pertumbuhan ekonomi ASEAN pada 2022 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global yang berada di level tiga persen.

BPK sebagai lembaga pemeriksa ikut berkontribusi untuk mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Melalui perannya di kancah global, BPK mengajak lembaga pemeriksa (SAI) dunia, termasuk ASEAN, mengawal isu-isu strategis yang diangkat dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Seperti diketahui, ada tiga pilar Priority Economic Deliverables (PEDs) atau area utama prioritas hasil di bidang ekonomi dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Salah satunya adalah mengenai Sustainability. Indonesia mendorong ASEAN mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi ekonomi hijau.

Pada awal Juni 2023, BPK menggelar seminar internasional bertajuk "Memanfaatkan Dampak Audit Kinerja menuju Ekonomi Hijau: Multi-Perspektif Regional, Nasional, dan Internasional" atau "Leveraging the Impact of Performance Audit towards a Green Economy: Multi-Perspectives Regional, National, and International". Seminar tersebut dihelat di Jakarta pada 5-7 Juni 2023.

Seminar internasional itu diikuti oleh delegasi SAI dari berbagai negara, tak terkecuali dari negara-negara ASEAN. Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya di seminar tersebut menjelaskan, ekonomi hijau adalah salah satu aspek signifikan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menciptakan fokus baru pada ekonomi, dan memberi perhatian pada hasil sosial dan lingkungan yang positif.

Sebagai bagian dari masyarakat global, lembaga pemeriksa keuangan



### **Isu-isu prioritas yang diangkat dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, selaras dengan strategi pemeriksaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024.**

memainkan peran penting dalam memastikan pencapaian SDGs melalui audit program pemerintah yang relevan. "SAI dapat melakukan audit kinerja dengan menggunakan prinsip dan standar International Organization of Supreme Audit Institutions (atau INTOSAI) untuk memastikan efektivitas ekonomi hijau dan SDGs," ujar Ketua BPK.

Melalui seminar itu, Ketua BPK mendorong peserta dapat memperoleh kesamaan perspektif dan pemahaman tentang bagaimana audit kinerja mempengaruhi masyarakat yang lebih baik dengan dampak yang positif dan signifikan, terutama dalam ekonomi hijau. Para peserta membahas kerangka kerja konseptual untuk dampak audit kinerja, bahkan memanfaatkannya dan menerapkannya dalam ekonomi hijau.

Ketua BPK menambahkan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan dampak audit kinerja, antara lain kualitas strategi dan rencana audit kinerja, kualitas laporan audit termasuk temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah tanggapan dan tindak lanjut oleh entitas yang diaudit, serta strategi komunikasi untuk menerbitkan laporan audit.

Selain berkontribusi melalui peran aktif di kancah internasional, BPK juga berperan menyukseskan semangat Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 melalui fungsi pemeriksaan. Isu-isu prioritas yang diangkat dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, bahkan selaras dengan strategi pemeriksaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap program-program yang dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti ekonomi digital, diplomasi ekonomi, Sustainable Development Goals, transisi energi, hingga perlindungan pekerja migran. Melalui keaktifan BPK di dunia internasional dan pemeriksaan yang dilakukan, diharapkan dapat membantu mewujudkan tekad untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. ~

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



# Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

## VISI KEKETUAAN ASEAN:

Membangun ASEAN yang mampu berketahanan, adaptif dan inklusif.

Membangun ASEAN yang memiliki peranan sentral.

Membangun ASEAN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara internal dalam negara kawasan maupun eksternal untuk dunia.

MYANMAR



LAOS



THAILAND



KAMBOJA



VIETNAM



FILIPINA



BRUNEI  
DARUSSALAM



MALAYSIA



SINGAPURA



INDONESIA



TEMA KEKETUAAN ASEAN 2023:  
**ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH**

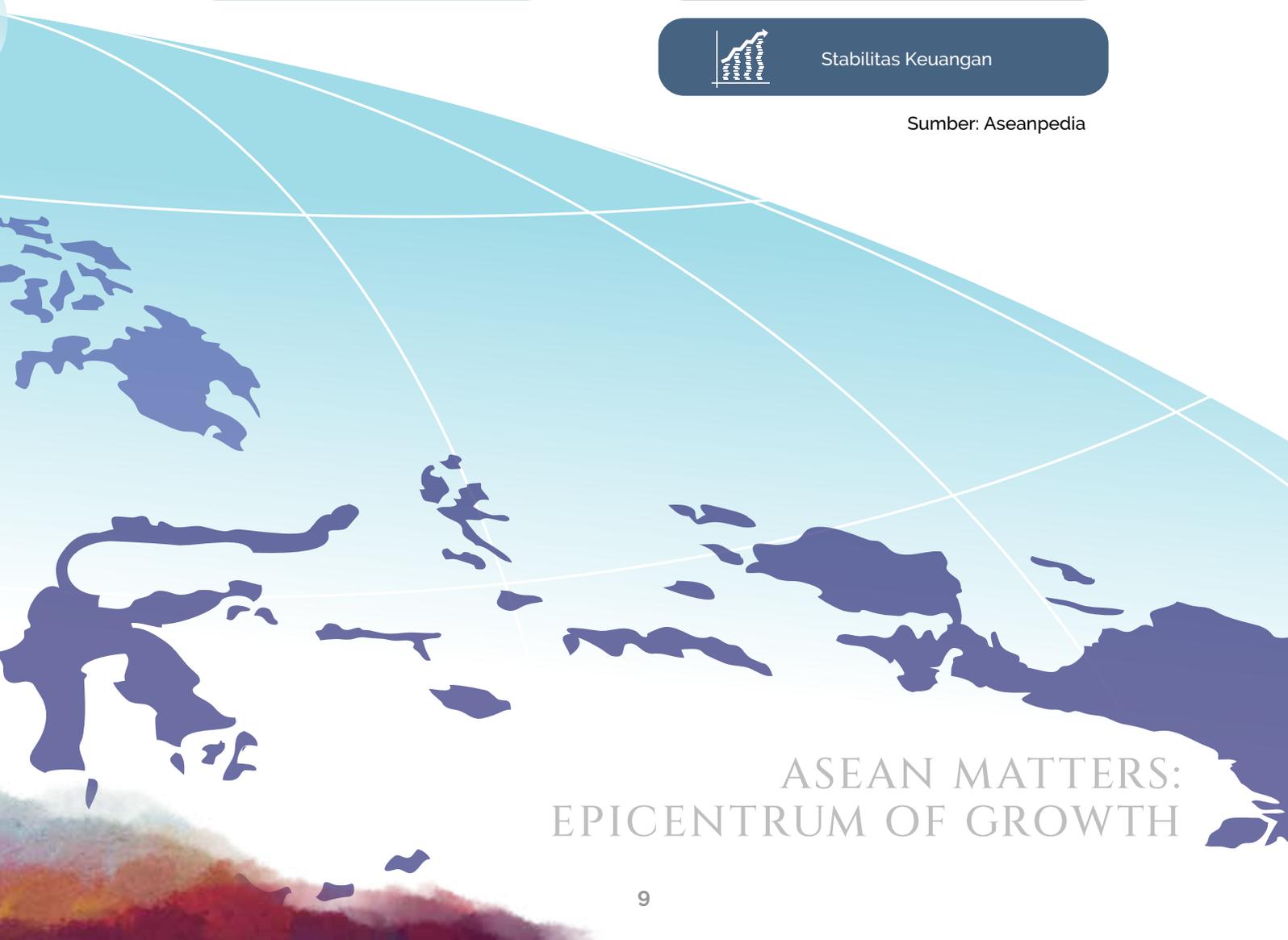
TIGA ELEMEN PENTING  
DALAM MAKNA TEMA  
ASEAN MATTERS:

- 1** Penguatan terhadap kapasitas dan efektivitas ASEAN
- 2** Persatuan ASEAN
- 3** Sentralitas ASEAN

EMPAT ELEMEN PENTING  
DALAM MAKNA TEMA  
EPICENTRUM OF GROWTH:

-  Arsitektur Kesehatan
-  Ketahanan Energi
-  Ketahanan Pangan
-  Stabilitas Keuangan

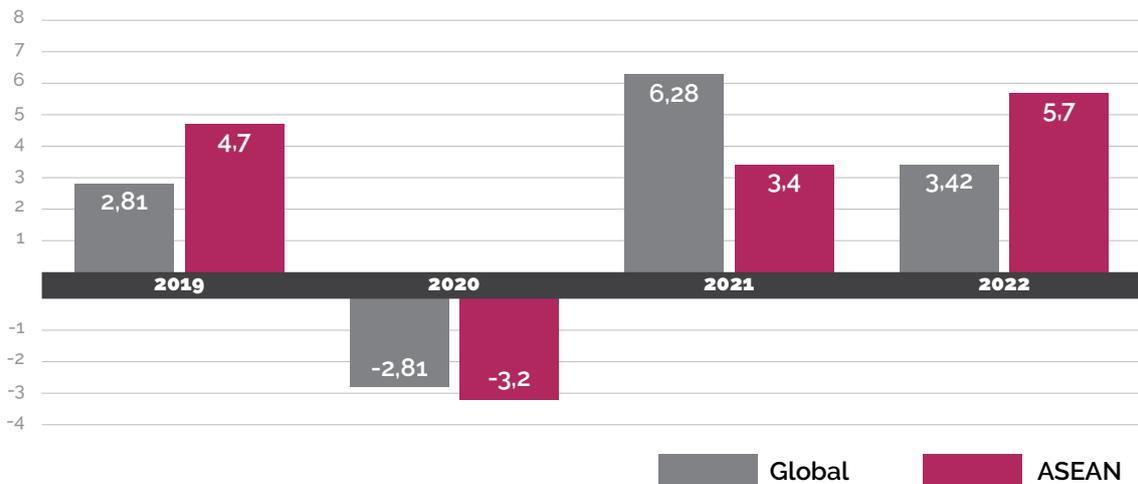
Sumber: Aseanpedia



ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



# Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi **ASEAN** dan Global (dalam persen)





■ Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023.

# Presiden Apresiasi Upaya BPK Kawal Perbaikan Program Prioritas Nasional

DENGAN KEPERCAYAAN INTERNASIONAL YANG TINGGI,  
KREDIBILITAS INDONESIA AKAN SEMAKIN DIAKUI.

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



■ Ketua BPK RI Isma Yatun bersama pejabat lainnya menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023.

**P**residen Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023. Pidato tersebut juga merupakan rangkaian HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

"Kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan Program Prioritas Nasional," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik pada 123 objek pemeriksaan yang terdiri atas 29 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 90 objek pemeriksaan pemerintah daerah (pemda), dan 4 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan tersebut meliputi 110 objek pemeriksaan kinerja dan 13 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.

Selain itu, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kepercayaan internasional yang dimiliki Indonesia saat ini. Dia menyampaikan, momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.

"Di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada," ungkap Jokowi.

Kepala Negara menekankan, dengan kepercayaan internasional yang tinggi, kredibilitas Indonesia akan semakin diakui. Suara Indonesia juga akan lebih didengar sehingga memudahkan dalam setiap negosiasi.



**Kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan Program Prioritas Nasional.**



■ Presiden RI Joko Widodo

"Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya," kata Jokowi.

Dia menjelaskan, strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Jokowi menyampaikan, angka *stunting* telah berhasil turun menjadi 21,6 persen di 2022 dari angka sebelumnya 37 persen serta menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022. Kemudian, telah ditingkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022.

Di saat yang sama, menurut Jokowi, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga, perlu dikembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai *window of opportunity* kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan," ujarnya.

Akan tetapi, Jokowi menekankan kaya sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Dia meminta Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya dengan menggenjot hilirisasi. Menurutnya, keuntungan melakukan hilirisasi jauh lebih besar dibandingkan hanya melakukan eksploitasi barang mentah tersebut.

"Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor *nickel ore* di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas," ujarnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengungkapkan, kepemimpinan ke depan akan sangat menentukan masa depan Indonesia. "Karena yang dibutuhkan adalah napas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas," kata Jokowi. ~

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



# BPK Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Penguatan Akuntabilitas

**SALAH SATU TANTANGAN YANG DIHADAPI SAAT INI  
ADALAH TERBATASNYA SUMBER DAYA.**

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memimpin The 48th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting yang diselenggarakan pada 6 Juli 2023 melalui konferensi video. Pertemuan itu dibuka oleh Ketua BPK Isma Yatun sekaligus menjadi Ketua 48th AAC Meeting.

Dalam acara tersebut, Isma menyoroti pentingnya peran AAC dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dari Sekretariat ASEAN.

Isma juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan organisasi lainnya, seperti ASEANSAI, untuk peningkatan kapasitas di bidang pemeriksaan sektor publik.

"Mempertahankan dan memperkuat kepercayaan serta keyakinan para pemangku kepentingan ASEAN adalah hal yang sangat penting. Harapannya, ASEAN akan semakin strategis dan didukung sebagai pusat pertumbuhan," kata Isma.

Dalam sambutannya, Isma menyampaikan, pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi telah direspons dengan peningkatan tata kelola di berbagai organisasi internasional. Menurutnya, hal ini perlu dicermati dan AAC harus mampu untuk menjawab tantangan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

"Dalam pertemuan yang penting ini, saya berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab tapi juga untuk memberikan pandangan dan pemikiran terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta pengendalian intern dan tata kelola yang lebih baik dari Sekretariat ASEAN," kata Isma.

Menurut Isma, AAC perlu memperhatikan perkembangan terkini dalam pelaporan keuangan dan proses audit terutama di organisasi publik. Hal ini termasuk standar akuntansi publik internasional, standar audit internasional termasuk standar internasional *Supreme Audit Institutions (SAI)*, dan *best practices* dalam laporan keuangan dan pemeriksaannya di tingkat organisasi internasional.



- Ketua BPK Isma Yatun saat memimpin The 48th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting yang diselenggarakan melalui konferensi video.



**Mempertahankan dan memperkuat kepercayaan serta keyakinan para pemangku kepentingan ASEAN adalah hal yang sangat penting. Harapannya, ASEAN akan semakin strategis dan didukung sebagai pusat pertumbuhan.**

Dia menilai, AAC perlu mempertimbangkan pembaruan terhadap *Terms of Reference* (TOR) yang dimiliki serta memperkuat audit internal dan fungsi evaluasinya. Hal ini untuk memperbaiki akuntabilitas Sekretariat ASEAN dan menjaga independensi pemeriksaan.

Pemilihan pemeriksa eksternal, menurutnya, juga perlu memperhatikan standar internasional dan praktik terbaik. Rotasi terhadap pemeriksa eksternal menjadi penting untuk menjaga standar dan praktik terbaik tersebut.

"Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan peran SAI negara anggota ASEAN dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola Sekretariat ASEAN yang lebih baik," ujarnya.

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya sumber daya. Menurut Isma, para anggota perlu mencari cara salah satunya dengan menggenjot kolaborasi di dalam organisasi serta entitas di ASEAN.

"Kerja sama dan kolaborasi Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI dalam peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman bisa diperkuat," ujarnya.

Menutup sambutannya, Isma mengakui Internal Audit and Evaluation Division (IAED) membutuhkan sumber daya manusia yang cukup. Meski demikian, terdapat tantangan adanya keterbatasan sumber daya saat ini. Sehingga, dia meyakini seluruh anggota dapat mendorong kerja sama dan upaya kolaborasi Sekretariat ASEAN dengan berbagai pihak di ASEAN.



**Dalam pertemuan yang penting ini, saya berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab tapi juga untuk memberikan pandangan dan pemikiran terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta pengendalian intern dan tata kelola yang lebih baik dari Sekretariat ASEAN.**

## HASIL PERTEMUAN

Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan AAC ke-48 adalah pembahasan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Sekretariat ASEAN Tahun Anggaran 2022. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pemeriksa eksternal, PricewaterhouseCoopers (PwC) dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

AAC kemudian merekomendasikan kepada pemeriksa eksternal untuk berkomunikasi secara intensif dengan Finance and Budget

Division (FBD) dari Sekretariat ASEAN. Hal itu untuk mempersiapkan adanya implementasi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) baru. Termasuk di dalamnya untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi Sekretariat ASEAN dengan IPSAS terbaru.

Pertemuan itu juga merekomendasikan kepada pemeriksa eksternal untuk meningkatkan koordinasi dengan Internal Audit and Evaluation Division (IAED) dalam proses pemeriksaan di lapangan.

Turut dibahas pula kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan internasional terkait pemeriksa eksternal dan penguatan tugas dan fungsi IAED. Tujuannya, yakni untuk meningkatkan akuntabilitas Sekretariat ASEAN serta menjaga independensi pemeriksaan. Hal ini juga untuk menjaga kepercayaan seluruh *stakeholder* Sekretariat ASEAN.

Salah satu negara anggota menyatakan, rotasi terhadap lembaga pemeriksa eksternal dapat dilakukan. Ini sejalan dengan *best practice* yang diimplementasikan di sejumlah organisasi internasional lain. Supreme Audit Institution negara-negara ASEAN (ASEANSAI) pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi auditor eksternal Sekretariat ASEAN.

Isu lain yang dibahas adalah upaya tindak lanjut Sekretariat ASEAN dan IAED terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan komitmen Sekretariat ASEAN untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik dari pemeriksa internal maupun eksternal. Selain itu, turut disepakati pengajuan peningkatan kapasitas untuk 2024.

Untuk pertemuan berikutnya, Laos sebagai Ketua AAC akan berhubungan dengan Sekretariat ASEAN. Laos juga akan menyiapkan pertemuan untuk tahun depan. ~



ASEAN  
INDONESIA  
2023



@bpkriofficial



@bpkri



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@humasbpkri.official



08111907010



@bpk.ri



▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

# Perbaiki Penyaluran BLT Desa

REALISASI BLT DESA PADA 410 PEMERINTAH DESA ATAU  
21,08 PERSEN DI 22 KABUPATEN TIDAK DIDUKUNG DENGAN  
BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN YANG LENGKAP DAN SAH.



■ Presiden Joko Widodo membuka resmi KTT ASEAN ke-42 di Hotel Meruorah Labuan Bajo.

**P**erekonomian di pedesaan menjadi salah satu isu yang dibahas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di masa Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Bahkan, negara-negara Asia Tenggara sepakat membentuk jaringan desa ASEAN dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang digelar pada 10-11 Mei 2023.

Terkait ekonomi pedesaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut menaruh perhatian dengan mengawal program-program yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah untuk masyarakat desa. Pada semester II 2022, misalnya, BPK melakukan pemeriksaan terkait penyaluran perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa. Ada sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK kepada pihak-pihak terkait untuk memperbaiki penyaluran BLT desa.

Pemeriksaan tersebut tentu relevan dengan semangat ASEAN untuk memajukan perdesaan. Upaya pembentukan jaringan desa ASEAN tentu juga harus disertai dengan peningkatan perekonomian warga desa.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran BLT desa oleh pemerintah daerah. Beberapa permasalahan itu mulai dari penyaluran yang berpotensi salah sasaran hingga pertanggungjawaban dan pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

Permasalahan itu diungkap BPK dalam pemeriksaan kepatuhan pada 28 pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya untuk tahun anggaran 2022. Pemeriksaan yang dilakukan pada semester II tahun 2022 tersebut, menjadi salah satu upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, terutama target 1.3 yaitu menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua.

Adapun salah satu program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dengan kegiatan prioritas antara lain penyaluran bantuan sosial tepat sasaran yang diwujudkan melalui proyek prioritas penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin.

Program perlinsos yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui BLT Desa. BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 26 pemkab sesuai kriteria dengan pengecualian dan sebanyak 2 pemkab tidak sesuai dengan kriteria.

Ada sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukan BPK terkait pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa. Pertama, sebanyak minimal 9.068 dari 40.921 (22,16 persen) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa pada 1.288 desa di 26 kabupaten tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan nilai salur sebesar Rp12,97 miliar.

Lalu, sebanyak minimal 164.340 kepala keluarga pada 541 desa di 15 kabupaten yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT Desa dengan nilai minimal sebesar Rp295,81 miliar.



**Pemeriksaan yang dilakukan pada semester II tahun 2022 tersebut, menjadi salah satu upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, terutama target 1.3 yaitu menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua.**

"Permasalahan itu mengakibatkan hasil pendataan tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan terdapat risiko salah sasaran dalam penyaluran BLT Desa," demikian disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada masing-masing kepala daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, melaksanakan pembinaan kepada pemerintahan desa (meliputi kepala desa dan badan permusyawaratan desa/BPD) tentang mekanisme pendataan calon KPM, penyelenggaraan musyawarah desa, penetapan KPM, penggantian/pemutakhiran KPM, Publikasi KPM BLT, serta penyusunan dan penetapan produk hukum pemerintahan desa secara memadai.

BPK juga menemukan permasalahan dalam hal pertanggungjawaban. Realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah desa atau 21,08 persen di 22 kabupaten tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, seperti bukti tanda terima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp27,76 miliar.



"Kondisi itu menyebabkan pertanggungjawaban BLT Desa belum menggambarkan kondisi penyaluran BLT Desa yang sebenarnya," tulis BPK.

BPK merekomendasikan agar masing-masing kepala daerah melalui OPD teknis terkait agar melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pemerintah desa terkait mekanisme dan tahapan penyaluran BLT kepada KPM untuk memastikan ketepatan penerima, nilai, dan waktu penyaluran bantuan kepada KPM, serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

Adapun dalam hal pembinaan ataupun pemantauan, sebanyak 23 dari 28 pemkab (82,14 persen) diketahui belum melaksanakan pembinaan/pemantauan dan/atau evaluasi melalui OPD terkait terhadap pemerintah desa atas pelaksanaan program BLT Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, sebanyak 23 dari 28 pemkab (82,14 persen) belum melaksanakan pembinaan/pemantauan dan/atau evaluasi melalui OPD terkait terhadap pemerintah desa atas pelaksanaan program BLT Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terkait hal ini, BPK merekomendasikan kepada masing-masing kepala daerah agar melaksanakan pembinaan melalui OPD terkait yang meliputi sosialisasi, pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan program BLT oleh desa." ~

# Mengawal Arah Diplomasi Ekonomi Indonesia

DITJEN PPI BELUM MENYUSUN *ROADMAP*  
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

**K**eterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi yang tengah digencarkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun turut serta mengawal pelaksanaan diplomasi ekonomi tersebut melalui tiga pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada pemerintah pusat yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemenu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka diplomasi ekonomi antara lain Kemenu telah melakukan revisi indikator kinerja utama (IKU) diplomasi ekonomi pada tahun 2022 terkait peningkatan nilai *trade*, *tourism*, dan *investment*.

Kemenu juga mendorong terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global. Hal ini ditunjukkan dengan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional dapat mencapai target yang ditetapkan.

Kemudian, Kemendag telah memiliki SOP untuk dua tahapan perundingan perdagangan internasional yaitu tahap praperundingan dan pascaperundingan. Kemendag juga telah menyusun tim perunding, dan melibatkan kementerian/ lembaga teknis terkait dalam perundingan perdagangan internasional.

Kementerian Investasi telah melakukan koordinasi dalam proses perumusan dan perundingan kerja sama investasi dengan K/L tahun 2020 sampai semester I tahun 2022. Selain itu, Kementerian Investasi juga telah menyusun dokumen rencana investasi berupa kajian, *investment project ready to offer* (IPRO), dan *pra-feasibility study* (pra-FS) sesuai sektor dan target *output* yang ditetapkan.

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



■ Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan sebelum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin, 4 September 2023.



**Belum terdapat *grand design* penyelenggaraan diplomasi ekonomi nasional. Akibatnya, regulasi yang ada belum dapat memayungi penguatan diplomasi ekonomi yang telah dilaksanakan.**

Kendati demikian, hasil pemeriksaan berhasil mengungkapkan 20 temuan yang memuat permasalahan. Hal itu antara lain regulasi yang mewadahi diplomasi ekonomi kurang lengkap, seperti UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Hublu) yang belum memuat klausul penyelenggaraan diplomasi ekonomi, dan peraturan lainnya (peraturan Menteri Luar Negeri) juga belum lengkap mengatur hal terkait diplomasi ekonomi. Selain itu, belum terdapat *grand design* penyelenggaraan diplomasi ekonomi nasional. Akibatnya, regulasi yang ada belum dapat memayungi penguatan diplomasi ekonomi yang telah dilaksanakan.

Kemenlu juga belum memiliki pedoman baku yang ditetapkan dalam penyelenggaraan diplomasi ekonomi. Pedoman yang ada saat ini, masih bersifat parsial pada wilayah tertentu atau pada aspek tertentu. Belum terdapat pedoman yang bersifat umum dan menyeluruh pada Kemenlu-*wide*. Akibatnya, penyelenggaraan kegiatan diplomasi ekonomi oleh Kemenlu dan perwakilan RI dalam rangka pencapaian sasaran strategi, belum sepenuhnya terarah.

Komite pengarah dan tim pokja juga belum cermat dalam melakukan penilaian usulan pemberian hibah kepada pemerintah/ lembaga asing. Selain itu, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional belum menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi tahun 2021 kepada Menteri Luar Negeri. Akibatnya, pelaksanaan pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak dapat diketahui manfaatnya dalam meningkatkan perekonomian nasional.

BPK juga mengungkapkan, Kemendag belum mempunyai *roadmap* perjanjian perdagangan internasional. Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Strategis Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa salah satu strategi yang diterapkan untuk mendukung arah kebijakan dalam rangka memperkuat koordinasi seluruh *stakeholders* perundingan perdagangan internasional, adalah penyusunan *roadmap* PPI. Namun, Ditjen PPI belum menyusun *roadmap* perundingan perdagangan internasional, walaupun telah memiliki data dan dokumen yang cukup.

Data dan dokumen tersebut yaitu berupa klasifikasi negara/pasar utama tujuan ekspor serta negara/pasar potensial/prospektif tujuan ekspor yang disusun oleh Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), serta analisis/kajian terkait dengan negara-negara yang berpotensi untuk dijadikan sebagai mitra PPI, dengan berbagai sudut pandang dan data yang mendukung yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag). Akibatnya, pemilihan negara mitra runding dalam PPI belum sepenuhnya efektif dan strategis untuk mendukung arah kebijakan peningkatan kualitas PPI dan memberikan manfaat bagi pelaku ekspor.

Kemudian, proses PPI juga belum seluruhnya didukung dengan kajian internal. Pada tahap praperundingan, hanya dua tahapan yang dilengkapi dengan kajian internal oleh BKPerdag, yaitu Perjanjian Indonesia-Australia

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Perjanjian Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (PTA). Sedangkan pada perjanjian lainnya hanya didukung dengan kajian *joint feasibility study* (JFS) atau laporan *general review* yang tidak detail dan teknis. Selain itu, hasil analisis kajian internal belum sepenuhnya dapat mendukung tim perundingan dalam proses perundingan. Akibatnya, hasil perundingan tidak optimal dan tidak memenuhi kebijakan kepentingan nasional.

BPK juga menemukan, pertukaran dan pemutakhiran data pada tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi kerja sama belum sepenuhnya memadai. Pertukaran dan pemutakhiran data kerja sama investasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenlu belum dilakukan secara berkala, sehingga terdapat perbedaan data kerja sama investasi antara laporan implementasi kerja sama investasi BKPM dengan laman *web* <https://treaty.kemlu.go.id>.

Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM belum menyusun panduan pelaksanaan kegiatan yang menjadi lingkup nota kesepahaman dengan Kemenlu terkait pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi dan belum mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi kerja sama investasi dan pemanfaatan data diplomasi bersama Kemenlu. Akibatnya, sinergi dan sinkronisasi kerja sama investasi sesuai dengan lingkup nota kesepahaman belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, serta pengambilan keputusan terkait dengan rencana tindak lanjut kerja sama maupun terkait hasil monitoring dan evaluasi berpotensi kurang tepat.

Pelaksanaan kegiatan promosi investasi juga belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan belum didukung dokumentasi yang memadai. Hal ini terlihat di antaranya pada perumusan strategi promosi di mana Kementerian Investasi/BKPM tidak melaksanakan analisis negara sumber investasi sesuai dengan pedoman dan tata cara promosi penanaman modal.



# ASEAN INDONESIA 2023



Selain itu, koordinasi Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) sebagai perwakilan BKPM di luar negeri dengan perwakilan RI dalam penyampaian laporan dan bahan promosi belum sepenuhnya memadai, di antaranya pemanfaatan *dashboard* investasi untuk menampilkan kegiatan promosi investasi, informasi mengenai peluang investasi dan pemutakhiran data terkait dengan investasi belum diatur mekanismenya dan belum dapat dilakukan. Sedangkan terkait dengan koordinasi dengan pemda, Kementerian Investasi/BKPM belum membuat pedoman untuk digunakan oleh pemda dalam penyusunan dokumen rencana investasi dan pengunggahannya pada laman Potensi Investasi Regional (PIR). Akibatnya, tidak tersedia data yang lengkap untuk acuan kegiatan promosi, perwakilan RI tidak menerima informasi yang lengkap terkait kegiatan promosi investasi, dan peluang investasi di daerah belum optimal dimanfaatkan dalam kegiatan promosi.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri agar menyelesaikan penyiapan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU Hublu untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendag, BKPM, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menyusun konsep *grand design* diplomasi ekonomi nasional.

Menlu juga perlu memerintahkan Sekjen untuk menyusun pedoman umum pelaksanaan diplomasi ekonomi, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian, bersama Komite Pengarah menginstruksikan tim pokja melakukan peninjauan kembali peraturan pelaksanaan tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, guna mendukung tata kelola hibah Pemerintah Indonesia.



**BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar memerintahkan Direktur Jenderal PPI untuk menyusun *roadmap* perjanjian perdagangan internasional untuk ditetapkan.**

BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar memerintahkan Direktur Jenderal PPI untuk menyusun *roadmap* perjanjian perdagangan internasional untuk ditetapkan. Kemudian, berkoordinasi dengan Kepala BKPerdag dalam rangka menetapkan standar isi substansi dan poin-poin kajian internal untuk mendukung proses perundingan perdagangan internasional, dan selanjutnya meminta BKPerdag untuk menyusun kajian internal sebagai bahan penilaian kelayakan rencana PPI.

Selain itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu menginstruksikan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal antara lain untuk mengusulkan konsep pedoman diplomasi ekonomi di bidang investasi kepada Kemenlu sebagai bentuk tindak lanjut nota kesepahaman yang mencakup perumusan, perundingan, dan pelaksanaan kerja sama serta evaluasi kerja sama investasi dan pemanfaatan data diplomasi. Kemudian, berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mengatur mekanisme pertukaran data terkait perjanjian investasi.

Menteri Investasi juga perlu menginstruksikan kepada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal antara lain untuk melaksanakan perumusan strategi promosi sesuai dengan pedoman serta hasil analisisnya ditindaklanjuti, memerintahkan IIPC dan direktorat terkait menyusun laporan tindak lanjut kegiatan promosi sesuai pedoman, serta membuat pedoman tentang penyampaian laporan kegiatan secara berkala kepada perwakilan RI di negara tempat kedudukan. Kemudian, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) perlu membuat pedoman penyusunan peluang investasi oleh pemda serta tata cara mengunggah dokumen digital peluang investasi daerah. ~

# Optimalisasi Peningkatan Citra Positif Indonesia **di Mata Dunia**

AKIBATNYA, KOMUNIKASI PEMASARAN MENJADI TIDAK SEPENUHNYA OPTIMAL.

ASEAN2023.ID



**P**emasaran pariwisata merupakan salah satu wajah terdepan citra Indonesia di hadapan dunia internasional. Terkait hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas satu objek pemeriksaan pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas peningkatan citra positif di dunia internasional, yaitu efektivitas pemasaran pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2011 sampai 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, pengembangan citra pariwisata merupakan bagian dari pemasaran pariwisata. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif, antara lain Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia. Kemenparekraf juga melakukan penyusunan pedoman pengukuran *brand awareness* untuk mengetahui tingkat *awareness* wisatawan terhadap *brand* Wonderful Indonesia.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan antara lain pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, penetapan target VITO tidak didukung antara lain oleh kesepakatan target *key performance indicator* (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO serta relevansi target KPI VITO dengan *scope of work* pada SK Penunjukan VITO. Akibatnya, komunikasi pemasaran menjadi tidak sepenuhnya optimal.

Upaya peningkatan daya saing pariwisata melalui Travel and Tourism Competitiveness Index/Travel Tourism Development Index (TTCI/TTDI) belum sepenuhnya memadai. Hal itu di antaranya yaitu Tim Kerja Lintas Sektor yang dibentuk dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya didukung dengan NSPK yang memadai, khususnya dalam hal pemutakhiran data TTCI/TTDI, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Tim Kerja Lintas Sektor juga belum berfungsi optimal dan eksistensinya belum sepenuhnya dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengolahan dan pemutakhiran data TTCI/TTDI belum mencakup semua indikator di dalam *dashboard* indikator penguatan sektor

pariwisata (IPKN) dan TTDI belum terintegrasi. Pelaporan hasil koordinasi strategis lintas sektor dalam pengelolaan indeks TTCI/TTDI tidak mencantumkan program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks TTCI/TTDI berikut dengan target pencapaian dan hasil pencapaiannya, tidak memuat progres penyelesaian tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disepakati dari hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor yang telah dilakukan, serta tidak memuat progres penyelesaian pemutakhiran data yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, tidak terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rencana aksi hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor pada tahun 2021 dan tahun 2022. Akibatnya, upaya peningkatan daya saing pariwisata menjadi kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menginstruksikan Deputi Bidang Pemasaran untuk menetapkan NSPK yang mutakhir yang mengatur penyelenggaraan VITO secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Kemudian, menetapkan perjanjian kinerja dengan VITO yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban dan target KPI beserta penjelasan detail lainnya yang terkait sesuai *scope of work*. Selain itu, perlu memerintahkan subkoordinator VITO untuk segera menyempurnakan perjanjian kinerja VITO sesuai dengan *scope of work* dan melakukan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu.

Menparekraf juga perlu membentuk Tim Kerja Lintas Sektor secara konsisten dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada stuktur organisasi Tim Kerja Lintas Sektor dan membentuk sekretariat untuk meningkatkan Kinerja Tim Kerja Lintas Sektor dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI. Selain itu, perlu juga memerintahkan Tim Kerja Lintas Sektor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan. ~



# Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA  
UNTUK  
UMUM  
GRATIS!**



**Alamat:**  
Jl. Diponegoro  
No 1, Magelang

**Buka:**  
Selasa - Minggu  
09:00-15:00

(0293) 310230

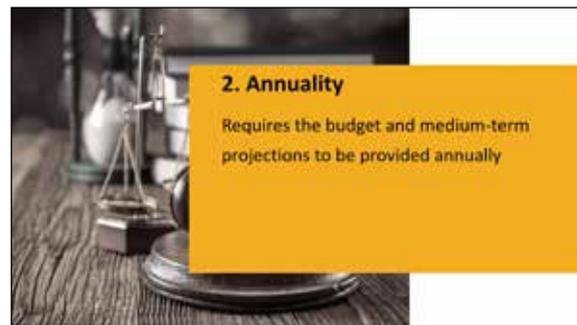
[museum.bpk.go.id](http://museum.bpk.go.id)

[museum\\_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi di berbagai ruangan menarik

# SAO Thailand Paparkan 10 Prinsip Aturan APBN di Negaranya

UU DI THAILAND MEMBERIKAN KUASA KEPADA LEMBAGA PEMERIKSA  
UNTUK MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF.



**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan delegasi lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution-SAI) Thailand atau the State Audit Office of The Kingdom of Thailand (SAO Thailand) di kantor pusat BPK dan Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK, Jakarta, Selasa-Kamis (29 s.d 31 Agustus 2023). Kunjungan delegasi SAO Thailand ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan.

Salah satu rangkaian kegiatan kunjungan tersebut adalah berbagi pengetahuan mengenai peraturan keuangan negara di Thailand.

Komisioner SAO Thailand Prof. Dr. Orapin Phonsuwan Sabyeroop dalam kesempatan itu

menjelaskan mengenai 10 Principle of Budget Law atau 10 prinsip yang menjadi panduan dalam undang-undang anggaran negara.

Prinsip pertama adalah Legalitas/Kewenangan. Legalitas atau kewenangan bermakna bahwa aturan atau undang-undang membutuhkan persetujuan dari badan legislatif terkait total anggaran pengeluaran tahunan, di mana hal itu konsisten dengan strategi kebijakan fiskal yang disepakati.

Tidak hanya dalam anggaran. Dalam hal pajak, pengeluaran dan pendapatan tidak bisa diputuskan tanpa ada persetujuan dari badan legislatif. "Artinya pajak tidak bisa dikumpulkan dan digunakan untuk kebutuhan anggaran tanpa ada persetujuan legislatif," kata Orapin.

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



Dia menjelaskan, belanja atau pengeluaran pemerintah juga memiliki aturan hukum. Walau memiliki kewenangan, namun persetujuan penggunaannya hanya bisa dilakukan oleh anggota dewan perwakilan. "Tidak ada penggunaan pajak tanpa persetujuan wakil rakyat," ungkap dia.

Berikutnya atau yang kedua adalah *Annuality*. Prinsip ini mengharuskan tiap anggaran dan proyeksi jangka menengah ke depan selalu ada setiap tahun. Ia mengatakan tiap tahunnya dibuat perkiraan besaran anggaran tahunan dan perkiraan belanja yang kemudian disampaikan ke parlemen.

"Dokumen APBN disampaikan kepada parlemen dari waktu ke waktu agar bisa disetujui secara periodik," ucap dia.

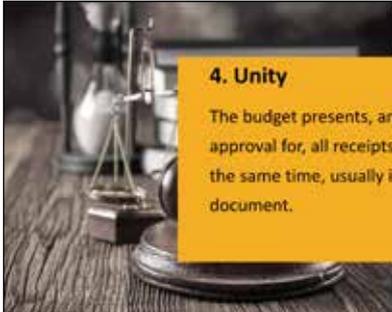
Prinsip ketiga adalah Universal atau *Universality*. Maksudnya, semua pendapatan dan belanja dimasukkan ke dalam *gross basis*. Pendapatan juga tidak dialokasikan untuk tujuan-tujuan tertentu (*earmarked*).

Prinsip keempat ialah *Unity*. Pada prinsipnya, kata dia, penyajian APBN, baik permintaan persetujuan, penerimaan dan pembayaran dilakukan pada saat yang sama. Semua ada dalam satu dokumen.



**3. Universality**

All revenues and expenditures are included in the budget on a gross basis. Revenues are not earmarked. Expenditures are not offset by revenues.



**4. Unity**

The budget presents, and may seek approval for, all receipts and payments at the same time, usually in the same document.



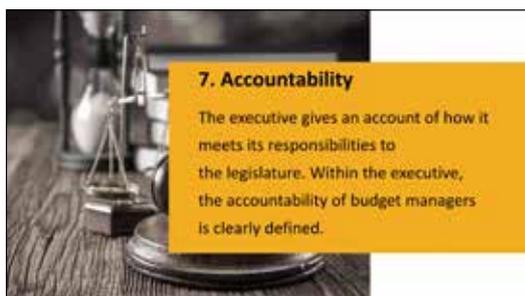
**5. Specificity**

Revenues and expenditures are shown with some detail in the budget estimates. Spending authorizations show legally binding maximum expenditures for particular purposes.



Kemudian prinsip kelima mengenai kekhususan atau *Specificity*. Dalam prinsip ini, pendapatan dan belanja ditampilkan secara spesifik dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Kewenangan penggunaan anggaran (*spending authorizations*) menunjukkan belanja maksimum untuk tujuan tertentu.

"Prinsip keenam ialah *balance*. Belanja anggaran diimbangi dengan pendapatan dan pembiayaan."

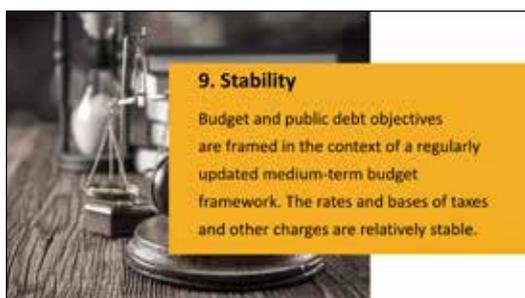


Selanjutnya atau prinsip ketujuh adalah akuntabilitas atau *accountability*. Pemerintah atau eksekutif memberikan penjelasan secara resmi tanggung jawab penggunaan anggaran kepada parlemen atau badan legislatif. Pertanggungjawaban dari pengelola anggaran dalam eksekutif harus dijelaskan secara baik.

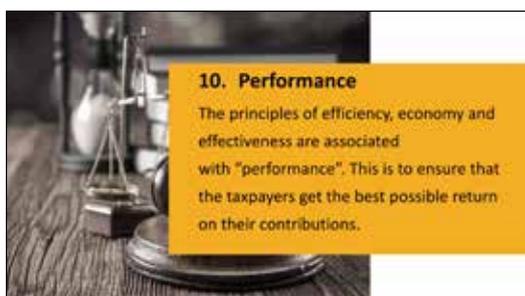
"Akuntabilitas adalah pedoman yang baru namun sangat diperlukan, dalam hal ini mencakup kebutuhan akan lembaga pemeriksa keuangan" ucap dia.



Kedelapan adalah keterbukaan atau *transparency*. Peran berbagai badan atau lembaga wajib diketahui atau jelas. Informasi penggunaan anggaran atau keuangan dan nonkeuangan wajib diperlihatkan kepada khalayak umum. Berbagai istilah yang digunakan dalam UU APBN juga harus didefinisikan dengan jelas.



Prinsip kesembilan adalah stabilitas. APBN dan *public debt* disusun dalam kerangka anggaran jangka menengah yang harus diperbarui secara periodik atau berkala. Tarif pajak dan pungutan lainnya juga harus stabil.



Sedangkan prinsip kesepuluh adalah kinerja atau *performance*. Kinerja amat terkait dengan efisiensi, efektivitas dan kondisi ekonomi. Ini untuk memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan apa yang layak mereka raih sesuai kontribusinya.

"10 pedoman dalam UU APBN yang digunakan di Thailand dan mungkin negara lainnya disesuaikan dengan kondisi sosiopolitik, ekonomi dan keunikan suatu negara," ucap dia.



■ Prof. Dr. Orapin Phonsuwan Sabyeroop



**10 pedoman dalam UU APBN yang digunakan di Thailand dan mungkin negara lainnya disesuaikan dengan kondisi sosiopolitik, ekonomi dan keunikan suatu negara.**

#### **FUNGSI DAN TUGAS SAO THAILAND**

Prof Orapin di saat yang sama juga menjelaskan bahwa seperti di negara-negara demokrasi lainnya, pemerintahan berjalan dengan ketentuan sesuai hukum. Hukum hadir sebagai rambu dan petunjuk bagi tiap individu dan institusi yang ada di Thailand. Salah satu lembaga yang berjalan dengan rambu hukum menurut dia adalah State Audit Commission.

State Audit Commission berfungsi sebagai penjaga dan penunjuk bagi pemerintah. Wewenang tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal

27 sub pasal 4 dan 5 Undang-Undang Audit Negara Tahun 2018. Berdasarkan aturan, State Audit Commission secara aktif menyarankan, merekomendasikan dan mengusulkan dalam rangka belanja pemerintah, untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang. Lembaga juga bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin fiskal dan keuangan negara.

Wewenang pengawasan keuangan negara juga berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Audit Negara, bahwa Tugas Komisi Pemeriksa adalah menetapkan kebijakan dan standar pemeriksaan keuangan negara yang memandu langkah-langkah *Auditor General*.

Mereka juga mengawasi kegiatan audit negara, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, standar dan undang-undang disiplin keuangan negara. Kuasi Yuridiksi State Audit Commission adalah cerminan dari peran penting lembaga dalam menjaga disiplin penggunaan keuangan tiap-tiap lembaga negara.

UU di Thailand juga memberikan kuasa kepada lembaga pemeriksa untuk menjatuhkan sanksi administratif. Bentuk hukuman yang bisa diberikan lembaga pemeriksa di Thailand ada tiga sesuai dengan level beratnya kesalahan. Pertama, adalah surat dari lembaga hukum. Kedua, pengungkapan kesalahan publik dan terakhir adalah denda administratif.

"Jika diibaratkan negara adalah sebuah kapal yang berlayar maka State Audit Commission adalah kompas yang memastikan kapal mengarah kepada jalur yang benar," papar dia. ~





# Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file  
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPKRI Official



@humasbpkri.official



@bpkri

# BPK dan SAI Vietnam Sepakat Bahas Pemeriksaan Pengelolaan Sampah

FORUM INI MERUPAKAN MOMENTUM YANG TEPAT UNTUK SALING BELAJAR BAGI KEDUA INSTITUSI GUNA PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS AUDIT YANG BERDAMPAK BAGI MASYARAKAT.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan SAI Vietnam atau The State Audit Office of Vietnam (SAV) sepakat membahas pemeriksaan pengelolaan sampah pada tahun ini. Termasuk di dalamnya metodologi audit yang digunakan, temuan pemeriksaan, tantangan, dan *lesson learned* yang diperoleh selama pemeriksaan.

Hal ini dikemukakan pada saat Ketua BPK Isma Yatun melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Auditor General SAV Ngo Van Tuan. Pada kesempatan itu Isma juga menghadiri *the 3rd joint workshop* dengan tema "Waste Management Audit" yang diselenggarakan di kantor pusat SAV di Hanoi, Vietnam, Jumat (11/8/2023).

*Workshop* ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral antara SAV dan BPK pada 2023. Tujuannya,



sebagai forum saling berbagi pengalaman dan pengetahuan kedua institusi dalam upaya mengembangkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan di kedua institusi.

Pemateri dari BPK adalah Normas Andi Ahmad (auditor Auditorat Utama Keuangan Negara IV). Sedangkan pemateri dari SAV adalah Le Tung Lam, *director general of Specialized Audit Department No III SAV*.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi kepada SAV atas dedikasi dan upaya dalam penyelenggaraan *workshop*. Dipaparkan, forum ini merupakan momentum yang tepat untuk saling belajar bagi kedua institusi guna peningkatan kapasitas dan peningkatan kualitas audit yang berdampak bagi masyarakat.



BPK juga merasa terhormat menjadi partner dan dipercaya sebagai mitra dan mentor bagi upaya pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemeriksa di SAV di dalam berbagai bidang audit. Secara khusus BPK telah menyanggupi untuk memberikan pelatihan bagi auditor SAV dalam topik *forensic audit* pada kuartal keempat 2023 yang akan diselenggarakan di kantor SAV di Hanoi.



Auditor General SAV dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK atas komitmen dan konsistensi yang diberikan sebagai mentor SAV untuk mengembangkan kapasitas pemeriksaan dalam berbagai topik.



Sebagai kelanjutan dari kerja sama bilateral ini, kedua SAI mengusulkan penyelenggaraan kembali *workshop* bersama dengan topik "big data analytics" dan "digital transformation". ~

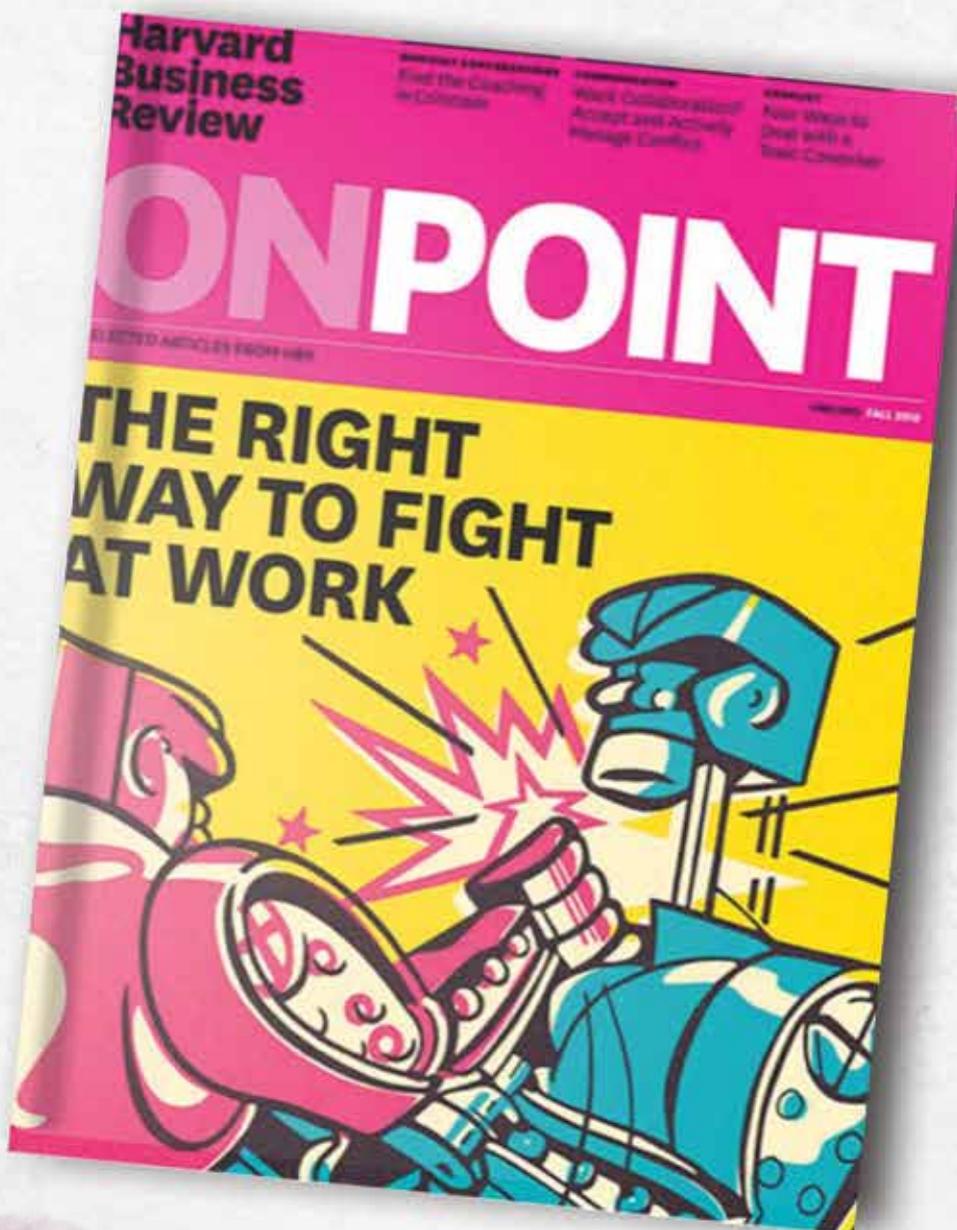
## ASEAN MATTERS: EPICENTRUM OF GROWTH



**ASEAN** INDONESIA  
2023 

# Mengelola Konflik di Lingkungan Pekerjaan

OLEH **ARIS SETIYANTO**



Judul Buku :  
**Harvard Business Review  
ONPOINT-The Right Way  
to Fight atWork**

Tahun Terbit :  
Fall, 2018

Penerbit :  
Harvard Business Review,  
Boston, MA

Tebal :  
124 halaman

**P**erbedaan pendapat dalam pekerjaan menjadi bagian yang tidak terhindarkan, dan seringkali menjadi bagian dari inovasi, penyelesaian masalah, dan peningkatan kinerja. Meski demikian, perbedaan pendapat tidaklah mudah untuk dikelola.

Beda pendapat seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dalam pekerjaan dan jika tidak ditangani secara baik akan berdampak pada penurunan produktivitas dan dapat mengarah pada konflik yang berbahaya. Harvard Business Review (HBR) On Point-The Right Way to Fight at Work terbitan musim gugur 2018 memberikan tips bagaimana mengelola konflik pekerjaan kerja secara baik akan dapat membawa pada lingkungan kerja yang lebih menarik dan inovatif.

Beda pendapat, beda gaya kerja, persaingan, ketimpangan beban kerja, *deadline*, maupun kondisi lingkungan sosial masing-masing individu dapat menimbulkan konflik dan gesekan dalam aktivitas pekerjaan. HBR On Point edisi ini sangat menarik karena memuat 16 artikel pilihan dari para pakar terkemuka, dengan tema yang sangat relevan dengan apa yang terjadi di lingkungan kerja saat ini.

Amy Gallo dalam salah satu artikelnya, "The Right Way to Fight" memberikan tips bagaimana menangani perbedaan pendapat dengan rekan kerja yang pada akhirnya dapat membawa resolusi yang disetujui semua pihak. Namun bagaimana jika beda pendapat tersebut terjadi antara kita dengan atasan kita atau senior kita? Misalnya kita diberi suatu proposal yang menurut analisis kita tidak akan berjalan atau target yang tidak realistis, bagaimana cara kita mengkomunikasikan hal tersebut?

Amy Gallo pada artikel "How to Disagree with Someone More Powerful Than You" memberikan tips praktis yang dilengkapi dengan contoh studi kasus. Lalu bagaimana jika kita terjebak di antara konflik atasan dan atasan dari atasan kita? Bagaimana cara kita menyikapinya tanpa merusak hubungan kita dengan keduanya?

Rebecca Knight pada artikel "What to Do When You're Stuck Between Your Boss and Your Boss's

”  
**Menghadapi konflik mungkin tidak menyenangkan, tetapi itulah fakta yang terjadi di tempat kerja. Tanpa pengetahuan yang baik tentang bagaimana mengelola konflik di lingkungan kerja, maka konflik akan semakin berlarut-larut dan membahayakan organisasi.**

Boss" memberikan saran ahli dengan beberapa kemungkinan skenario situasi konflik yang terjadi di antara mereka, dan apa yang mesti kita lakukan dan kita hindari.

Atau Joel Garfinkle (How to Have Difficult Conversations When You Don't Like Conflict) dan Monique Valcour (Eight Ways to Get Difficult Conversation Back on Track) yang memberikan tips cara berkomunikasi jika seseorang tidak menyukai konflik. Menunda dan menghindari interaksi untuk menghindari konflik mungkin saja akan berhasil, tetapi bagaimana jika itu adalah atasan kita dan rekan satu tim kita?

Tentu hal tersebut dapat kontraproduktif dan dapat membawa pada rusaknya hubungan dan dampak negatif lainnya. Atas kondisi ini, Dorie Clark memberikan strategi bagaimana cara kita memperbaiki hubungan profesional yang telah rusak melalui artikel "How to Repair a Damaged Professional Relationship".



Secara keseluruhan, HBR-On Point edisi ini memuat 16 artikel yang dikelompokkan menjadi dua tema utama, yakni 11 artikel tentang mengelola diri sendiri (*managing yourself*) dan sisanya tentang bagaimana mengelola orang lain (*managing others*).

Artikel *managing yourself* ditempatkan pada bagian pertama edisi ini, sebagai berikut:

1. The Right Way to Fight (Amy Gallo)
2. How to Have Difficult Conversation When You Don't Like Conflict (Joel Garfinkle)
3. Eight Ways to Get a Difficult Conversation Back on Track (Monique Valcour)
4. How to Disagree with Someone More Powerful Than You (Amy Gallo)
5. Four Ways to Deal with a Toxic Coworker (Abby Carnow-Chavez)
6. How to Handle a Colleague Who's a Jerk When the Boss Isn't Around You (Amy Jen Su)
7. How to Navigate a Turf War at Work (Amy Gallo)
8. What to Do When You're Stuck Between Your Boss and Your Boss's Boss (Rebecca Knight)
9. A Three Step Process to Break a Cycle of Frustration, Stress, and Fighting at Work (Annie McKee)
10. When and How to Let a Conflict Go (Jeanne Brett)
11. How to Repair a Damaged Professional Relationship (Donie Clark)

Bagian akhir edisi ini memuat artikel *managing others*, yakni:

1. How to Handle a Disagreement on Your Team (Jeanne Brett – Stephen B. Goldberg)

2. How to Manage a Toxic Employee (Amy Gallo)
3. How Self-Managed Teams Can Resolve Conflict (Amit Maimon)
4. Most Work Conflict Aren't Due to Personality (Ben Dattner)
5. Why We Should Be Disagreeing More at Work (Amy Gallo)

Ada beberapa hal yang menjadikan edisi ini istimewa. Pertama, topik yang diambil merupakan hal yang riil yang terjadi dalam lingkungan kerja. Perbedaan pendapat, konflik/gesekan antar rekan kerja, antar pimpinan, maupun antara pimpinan dan bawahan jika tidak dikelola secara tepat, akan berdampak pada lingkungan kerja yang tidak kondusif yang mengarah pada penurunan produktivitas dan berdampak negatif pada tujuan organisasi.

Kedua, HBR edisi ini memberi rujukan praktis dari para ahli terkemuka di bidangnya, yang menggabungkan penelitian manajemen terbaru dan ide-ide berbasis bukti tentang bagaimana pengelolaan konflik dalam organisasi.

Ketiga, tata letak halaman sangat menarik, penyampaiannya dalam kalimat-kalimat yang ringkas namun sistematis, serta adanya contoh studi kasus dan tips manajemen yang memudahkan pembaca memahami inti permasalahan serta solusi-solusi aplikatif yang disarankan.

Menghadapi konflik mungkin tidak menyenangkan, tetapi itulah fakta yang terjadi di tempat kerja. Tanpa pengetahuan yang baik tentang bagaimana mengelola konflik di lingkungan kerja, maka konflik akan semakin berlarut-larut dan membahayakan organisasi. HBR edisi ini dapat menjadi rujukan bagi pegawai, manajemen, maupun pimpinan, bahwa mengelola konflik secara tepat dapat membawa pada peningkatan lingkungan kerja yang menarik dan inovatif. ~



# PENGAMANAN Email



## Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

# BPK Berperan Sukseskan Visi Indonesia Emas 2045

**ADA BERBAGAI UPAYA TRANSFORMASI DAN REFORMASI YANG SAAT INI  
DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM MENYOKONG VISI INDONESIA EMAS.**

**M**enteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini memiliki target Visi Indonesia Emas 2045. Melalui visi tersebut, Indonesia ditargetkan akan masuk dalam jajaran negara berpendapatan tinggi atau menjadi negara maju pada 2045.

Ada berbagai upaya transformasi dan reformasi yang saat ini dilakukan pemerintah dalam menyokong Visi Indonesia Emas. Airlangga menekankan, transformasi tersebut membutuhkan dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal yang independen.

"Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata Kklola, akuntabilitas, evaluasi, dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur," kata Airlangga saat menghadiri Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2023, di Jakarta, akhir Agustus.



■ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Terkait target menjadi negara maju, Airlangga menyebut Indonesia sudah memiliki bekal dalam menyokong Visi Indonesia Emas. Data terakhir menunjukkan pertumbuhan RI pada kuartal II 2023 mencapai 5,17 persen. Selama tujuh kuartal terakhir, ucap dia, pertumbuhan Indonesia selalu berada di atas 5 persen.

Hasil ini membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dengan pendapatan. "Di Akhir tahun ini diharapkan pendapatan per kapita

kita capai 4.700 dolar AS dan di tahun depan diperkirakan 5.500 dolar AS per kapita," ungkap dia.

Capaian ini turut didukung oleh peningkatan daya saing berturut-turut IMD World Competitiveness Ranking, yang naik 10 tingkat dari 44 ke 34. Posisi ini lebih baik dari Jepang yang berada di peringkat 35, India 40, Filipina ke 52 dan Brasil di 60.

"Berbagai lembaga pemeringkatan juga mempertahankan status investment grade rating bagi Indonesia dan kinerja dengan inflasi yang rendah. Maka ini menunjukkan bahwa perekonomian berada pada jalur yang benar," ucap dia.

Selain itu, indikator sosial juga sudah membaik. Contohnya tingkat pengangguran turun jadi 5,45 persen di bulan Februari 2023, rasio gini atau ketimpangan pun juga turun di 0,39 pada Maret 2023 dan tingkat kemiskinan pun menjadi 9,4 persen.

Demikian pula kemiskinan ekstrem sempat ke angka 5,8 persen dan turun menjadi 1,12 persen. Prospek ekonomi juga terlihat dari indeks konsumsi di atas 100 yaitu di level optimis yaitu di 123,5.

Airlangga menamahkan, rasio utang luar negeri masih di angka 29,3 persen dan cadangan devisa sebesar 137,7 miliar dolar AS. "Nah kita juga melihat fundamental ekonomi, ini menjadi landasan yang baik untuk target-target ke depan. Di antara negara-negara lain, kita lihat pertumbuhan kita hanya di bawah Filipina dan Uzbekistan dan tingkat inflasi juga relatif rendah," ungkap dia.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2045 yakni memiliki PDB Nominal sebesar 9,8 triliun dolar AS atau menjadi lima besar PDB dunia dan GNI per kapita 30.300 dolar AS. Porsi penduduk middle income sebesar 80 persen, kontribusi industri manufaktur pada PDB ditingkatkan dari saat ini 19 persen menjadi 28 persen, dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja.

"Nah untuk mencapai *high income country* di kisaran 2038 sampai 2041, pertumbuhan per tahun 5 persen tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6-7 persen," katanya.

Ia pun bersyukur Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi Indonesia Emas, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak demografi dalam 13 tahun ke depan. "Oleh karena itu, tidak bisa kita hanya menunggu, kita pasif, kita harus aktif, agar bonus demografi yang 13 tahun ini hanya bisa kita capai," tutur dia.

Indonesia juga memiliki modal sumber daya alam, antara lain, 125,57 juta hektare kawasan hutan, cadangan sumber daya energi mineral dan potensi energi baru terbarukan sebesar 3.716 gigawatt.

"Pemerintah juga terus mendorong program strategis nasional (PSN). Saat ini sudah ada 158 PSN yang diselesaikan dalam delapan tahun terakhir dengan nilai investasinya sebesar Rp 1.263 triliun," ujar Airlangga.

Pemerintah, tegas Airlangga, juga meningkatkan daya saing dengan hilirisasi, peningkatan ekspor, dan penerapan devisa hasil ekspor.

"Devisa hasil ekspor ini untuk menerapkan UU pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuhnya kepentingan nasional, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi hasilnya. Selama ini hasilnya hanya hasil fisik, dimana hasilnya hanya parkir di New York atau di Singapura. Tetapi kekayaan alam ini kan yang paling penting nilainya kita *capture* di dalam negeri," ungkap dia.

Tentu kebijakan devisa hasil ekspor banyak memiliki tantangan dari berbagai sektor industri, terutama sektor ekstraktif. Akan tetapi semua harus dimulai karena ini pertama kali Indonesia menerapkan masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Saat ini hanya tiga negara di dunia yang melakukan itu, yaitu Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. ~



# Pengamanan **Password**



- **Gunakan *password* yang kuat**  
Panjang *password* minimal 8 karakter.
- Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.
- Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.
- **Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri**  
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

## **Jaga Keamanan *Password***

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh : menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

*Logout* dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

# Mencegah Konflik Moral di Tempat Kerja

**MORALITAS ADALAH KUNCI SUKSES UNTUK TERJADINYA KERJA SAMA,  
KOMUNIKASI, KOORDINASI, DAN KOLABORASI DI TEMPAT KERJA.**

**M**oralitas sangat diperlukan dalam hubungan kerja dan biasanya menjadi bagian dari budaya organisasi. Kualitas moralitas di tempat kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pengetahuan.

Mengingat pentingnya moralitas di lingkungan kerja, Bincang ECC edisi Agustus mencoba mengulas mengenai konflik moral di tempat kerja. ECC dalam ulasannya yang diterima *Warta Pemeriksa* menekankan, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar moralitas yang kuat terbentuk dan membudaya di tempat kerja.

Moralitas, kesadaran diri, disiplin diri, dan manajemen diri sangat diperlukan oleh setiap karyawan saat melayani pekerjaan di tempat kerja. Moralitas adalah kunci sukses untuk terjadinya kerja sama, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di tempat kerja. Jelas, setiap orang di tempat kerja harus bisa berbagi fungsi dan peran agar pekerjaan besar menjadi lebih ringan. Saat moralitas tinggi, setiap karyawan dapat dengan bahagia dan gembira saling membantu agar tujuan dan pelayanan dapat terwujud sesuai harapan.

Nilai moral yang bersifat pribadi harus menyesuaikan diri dengan nilai moral yang dibuat oleh perusahaan. Jadi, nilai-nilai moral yang diutamakan dalam perusahaan haruslah menjadi sesuatu yang wajar bagi setiap karyawan. Bila karyawan diam-diam lebih mengutamakan nilai-nilai moral dari apa yang mereka yakini di luar keyakinan perusahaan, maka akan terjadi konflik yang berdampak pada hilangnya tujuan moralitas yang diharapkan oleh perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan dan kode etik perusahaan bertujuan untuk tidak mengembangkan sudut pandang tentang apa yang benar dan apa yang salah dari persepsi masing-masing orang. Jadi, moralitas di tempat kerja tidak bersumber dari sudut pandang seseorang, tetapi bersumber dari kode etik dan aturan kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

“  
**Setiap orang di tempat kerja harus bisa berbagi fungsi dan peran agar pekerjaan besar menjadi lebih ringan. Saat moralitas tinggi, setiap karyawan dapat dengan bahagia dan gembira saling membantu agar tujuan dan pelayanan dapat terwujud sesuai harapan.**

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



Sifat moralitas itu relatif atau tidak mutlak, karena bisa bersumber sesuai keyakinan dan tradisi masing-masing kelompok. Tetapi di tempat kerja, sumber moralitas haruslah satu, yaitu dari kode etik tertulis yang ditetapkan oleh manajemen. Dan, ini harus menjadi kesepakatan dari setiap karyawan sejak mereka pertama kali masuk ke dalam perusahaan.

Setiap perusahaan/organisasi memiliki kode etik masing-masing, namun demikian ada beberapa etika di tempat kerja yang berlaku secara umum.

Contoh-contoh etika di tempat kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu
2. Disiplin
3. Bertanggung jawab
4. Berpakaian rapi
5. Jangan melibatkan masalah pribadi di tempat kerja
6. Hindari membicarakan atasan
7. Hormati semua rekan kerja
8. Menjadi pribadi yang fleksibel
9. Jangan pernah memotong pembicaraan
10. Tidak gugup

## PENGERTIAN KONFLIK DAN KONFLIK MORAL

Terdapat berbagai macam prinsip etika yang berkembang dalam kehidupan kontemporer, seperti utilitarianisme, deontologi, etika hak asasi manusia, etika lingkungan, dan etika profesional. Setiap prinsip etika memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, sehingga diperlukan penilaian yang seksama dalam memilih prinsip etika yang tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi.

Konflik moral sering terjadi dalam kehidupan kontemporer, baik dalam lingkungan kerja, kehidupan pribadi, maupun dalam konteks sosial dan politik.



Konflik moral dapat disebabkan oleh perbedaan nilai atau prinsip etika yang berbeda antara individu atau kelompok, serta situasi yang kompleks dan sulit dipahami (Ar Rasyid, dkk., 2023). Tantangan dalam kehidupan kontemporer menuntut individu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dan kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi yang kompleks.

Beberapa tantangan etika yang dihadapi dalam kehidupan kontemporer, antara lain, adanya perkembangan teknologi yang cepat dan berdampak pada hak privasi dan keamanan, isu-isu lingkungan dan kesehatan, serta masalah korupsi dan kecurangan dalam berbagai sektor.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan kerja sama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri.

Beberapa contoh masalah etika di tempat kerja:

1. Kejujuran dan integritas
2. Konflik kepentingan
3. Pelecehan
4. Diskriminasi
5. Pencurian dan penipuan
6. Privasi

Masalah etika di tempat kerja terjadi ketika muncul situasi yang mengharuskan orang yang terlibat membuat keputusan tentang apa yang benar atau salah. Terlepas dari seberapa besar atau kecilnya masalah ini, mereka dapat dengan cepat meningkat jika dibiarkan.

Jika perusahaan memiliki standar etika yang tinggi, berarti mendukung lingkungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Ini juga berarti mengikuti hukum dan peraturan yang diperlukan.

#### **Berikut adalah beberapa contoh dilema etika yang dapat terjadi di perusahaan:**

- >> Seorang karyawan mempertimbangkan apakah akan menyimpan perlengkapan kantor untuk penggunaan pribadi.
- >> Seorang karyawan mengambil penghargaan dan pujian untuk pekerjaan rekan kerja lainnya.
- >> Manajer meminta karyawan untuk berbohong tentang sesuatu terkait pekerjaan mereka.
- >> Atasan secara terbuka menunjukkan lebih suka pada satu orang karena mereka masih berkerabat.
- >> Seorang karyawan menggunakan Bahasa kasar terhadap rekan kerja dan supervisor mereka.

#### **Cara menghadapi dilema etika di tempat kerja**

- Melakukan analisis risiko.
- Berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan.
- Reviu panduan perusahaan.
- Mengacu pada peraturan yang berlaku di industri.
- Mempercayai insting sendiri.
- Berbicara dengan orang yang bersangkutan.
- Meninggalkan situasi tersebut sepenuhnya. ~



**ASEAN** INDONESIA  
2023 

GALLERY ASEAN 2023



# Menggaungkan Semangat ASEAN 2023

**DALAM MENGGAUNGKAN SEMANGAT ASEAN 2023,  
BPK BAHKAN MENGGELAR SEJUMLAH KEGIATAN INTERNASIONAL  
YANG SELARAS DENGAN TEMA KEKETUAAN ASEAN INDONESIA 2023.**

**K**eketuaan ASEAN Indonesia 2023 mengusung tema yang sangat bermakna dan relevan dengan kondisi global saat ini, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak negara-negara ASEAN untuk bersama-sama membangun semangat agar kawasan Asia Tenggara menjadi pusat pertumbuhan dunia.

Semangat tersebut turut digaungkan oleh kementerian dan lembaga, tak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam menggaungkan semangat ASEAN 2023, BPK bahkan menggelar sejumlah kegiatan internasional yang selaras dengan tema Keketuaan ASEAN Indonesia 2023.



■ Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam acara "Konvensi Humas Indonesia 2023: Maju Bersama Untuk Indonesia" yang digelar secara daring pada awal September mengatakan, peran insan kehumasan pemerintah sangat penting untuk mendukung berbagai agenda nasional, termasuk KTT Ke-43 ASEAN .

Insan kehumasan, kata Menkominfo, memiliki peran strategis untuk menggaungkan semangat serta tema yang diusung dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023.

"Insan kehumasan memiliki peran strategis untuk turut menggaungkan optimisme ASEAN sebagai kawasan yang memiliki arti penting, yakni sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia," kata Menkominfo dikutip dari siaran pers.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo) Usman Kansong dalam kesempatan terpisah mengatakan, humas pemerintah atau pranata humas memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kemampuan ASEAN dalam konteks ekonomi dan politik. Insan kehumasan pemerintah bisa menggunakan berbagai saluran komunikasi yang dimiliki.

“**Insan kehumasan memiliki peran strategis untuk turut menggaungkan optimisme ASEAN sebagai kawasan yang memiliki arti penting, yakni sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.**



## ASEAN MATTERS: EPICENTRUM OF GROWTH

Hal itu ditekankan Usman dalam kegiatan Konvensi Nasional Pranata Humas 2023 bertema "Peran Penting Pranata Humas Mengawal Orkestrasi Gelaran ASEAN Summit 2023". Kegiatan itu digelar secara daring dan luring di Provinsi DIY, akhir Agustus.

Dia menambahkan, pranata humas juga memiliki peran krusial untuk membangun jembatan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. "Mari berkontribusi dalam mengglorifikasi momentum berharga ini," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Widiarsi Agustina dalam sesi wawancara di saluran Youtube Kementerian Kominfo menyampaikan, KSP ikut berperan mengorkestrasi narasi isu mengenai ASEAN.

Widiarsi mengatakan, KSP mengajak insan humas pemerintah menggaungkan tema Epicentrum of Growth. "Melalui tema ini, kita ingin ASEAN jadi pusat pertumbuhan dunia, pusat pemulihan, hingga pusat pendorong solidaritas dunia," kata Widiarsi. ~





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

# Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN  
Senin–Jumat

07.45

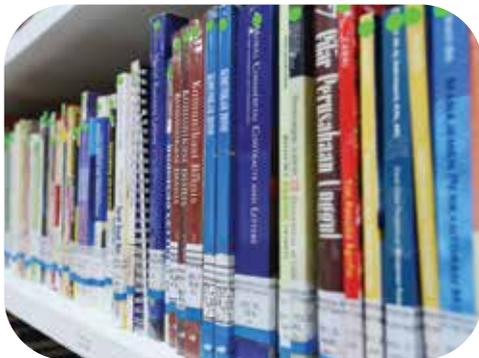
16.15

## TERBUKA UNTUK UMUM

Koleksi produk-produk BPK yang tidak dijumpai di perpustakaan lain



**Gedung BPK RI** Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat



Desain  
Ruangan  
Menarik



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



[BPK RI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



**ASEAN** INDONESIA  
2023 



# Slamet Edy Purnomo **Resmi Jadi** **Anggota BPK**

PERESMIAN ANGGOTA BPK INI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 60/P TAHUN 2023 TANGGAL 19 JULI 2023. KEPRES ITU BERISI TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPK.

**S**lamet Edy Purnomo resmi mengemban jabatan sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (1/8/2023). Prosesi pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto, di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa.

Peresmian Anggota BPK ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 60/P tahun 2023 tanggal 19 Juli 2023. Kepres itu berisi tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan Anggota BPK.

Dalam keputusan ini, disebutkan bahwa Presiden RI meresmikan pemberhentian dengan hormat Agus Joko Pramono sebagai Anggota BPK periode 2018-2023. Kemudian meresmikan pengangkatan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota BPK periode 2023-2028.

Sebelum dilantik sebagai Anggota BPK, Slamet Edy Purnomo telah menjalani tes kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Selanjutnya melalui mekanisme pemungutan suara oleh anggota Komisi XI DPR RI, Slamet Edy Purnomo terpilih menjadi Anggota BPK pada 31 Mei 2023.

Dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus, Slamet Edy Purnomo disetujui menjadi Anggota BPK. Pemilihan Anggota BPK ini berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU nomor 15



tahun 2006 yang menyatakan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI.

Setelah pengambilan sumpah, maka keanggotaan BPK saat ini berjumlah 9 orang. Delapan anggota lainnya yaitu Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Achsanul Qosasi, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, Pius Lustrilanang, dan Hendra Susanto.

Setelah peresmian ini, pembagian tugas dan wewenang Anggota BPK akan ditentukan dalam sidang Anggota BPK. Hal ini sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK nomor 1 tahun 2015 tentang pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK. ~

ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH

# Ketua BPK Sampaikan Pesan kepada CPNS Golongan II

KETUA BPK JUGA MENINGATKAN BAHWA SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN, PESERTA SEBAGAI ASN TIDAK HANYA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BPK. AKAN TETAPI JUGA KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI *STAKEHOLDER* UTAMA.



**A**paratur sipil negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, para ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara.

Kemudian harus bermoral, bermental baik, profesional, dan sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Serta mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada upaya peningkatan atas tiga pilar ASN," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun saat memberikan pengarahan kepada para peserta pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) dan peserta pelatihan dasar (latsar)



**Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat mengubah orang dan organisasi. Dengan cara menstimulus para subordinat untuk bekerja, untuk menghasilkan kinerja yang tinggi yang juga fokus pada aspek-aspek perubahan.**



calon pegawai negeri sipil (CPNS) golongan II tahun 2023 di gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Tiga pilar ASN tersebut pertama adalah sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan Tanah Air. Kedua, kompetensi teknis, manajerial atau kepemimpinan.

Ketiga adalah efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab. Ini sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Ketua BPK juga menyebutkan bahwa peserta PKA dituntut untuk mampu menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional dalam melaksanakan kegiatan di instansi menuju organisasi berkinerja tinggi (OBT).

"Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat mengubah orang dan organisasi. Dengan cara menstimulus para subordinat untuk bekerja, untuk

menghasilkan kinerja yang tinggi yang juga fokus pada aspek-aspek perubahan," ujar Ketua BPK.

"Untuk itu, jadilah pemimpin yang responsif, menginspirasi, sekaligus suportif, sehingga tercipta inovasi dan kreativitas, yang pada akhirnya menjadi kunci dari kepemimpinan transformasional dan kesuksesan jangka panjang organisasi dalam akselerasi institusi pada *era of digital disruption*," imbuhnya.

Ketua BPK juga mengingatkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, peserta sebagai ASN tidak hanya bertanggung jawab kepada BPK. Akan tetapi juga kepada masyarakat sebagai *stakeholder* utama.

Dalam laporannya, Kepala Badiklat PKN, Suwarni Dyah Setyaningsih menyampaikan bahwa latsar CPNS golongan II tahun 2023 dimulai sejak 14 Maret hingga 4 Agustus 2023. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah hasil penerimaan CPNS formasi lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebanyak 100 orang yang dibagi ke dalam 3 angkatan/kelas.

Sedangkan PKA diikuti oleh 22 orang peserta yang diselenggarakan pada 23 Juni-13 November 2023. Para peserta yang mengikuti PKA ini merupakan pejabat administrator yang berasal dari kantor pusat BPK, BPK Perwakilan, dan 1 orang dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Selain menggunakan metode pembelajaran klasikal, PKA ini menggunakan metode *e-learning* dan pembelajaran secara mandiri (*self learning*). ~



ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH

# Nyoman Adhi Suryadnyana Diambil Sumpah Sebagai Anggota MKKE dari unsur BPK

**MKKE MERUPAKAN PERANGKAT UNTUK MEMPROSES APABILA TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MAUPUN PEMERIKSA BPK.**

**P**impinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana diambil sumpahnya sebagai Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) dari unsur BPK. Nyoman menggantikan Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023) yang telah habis masa jabatannya.

Pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua BPK, Isma Yatun di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Pengambilan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota MKKE BPK dari Unsur BPK dan Nomor 7/K/I-XIII.2/8/2023 tentang Pengangkatan Anggota MKKE BPK tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dari unsur BPK.

MKKE merupakan perangkat untuk memproses apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota maupun pemeriksa BPK.





”  
**Sebagai upaya mendukung penegakan kode etik, BPK memiliki fasilitas aplikasi *whistleblowing system* (WBS) yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik BPK.**

Sebagai upaya mendukung penegakan kode etik, BPK memiliki fasilitas aplikasi *whistleblowing system* (WBS) yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik BPK.

Sesuai mandat dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, MKKE BPK memiliki susunan keanggotaan yang cukup independen. Terdiri dari unsur anggota BPK, unsur profesi, dan unsur akademisi.

Dengan pengambilan sumpah tersebut, susunan Anggota MKKE BPK saat ini adalah Achsanul Qosasi (ketua merangkap anggota MKKE). Kemudian Nyoman Adhi Suryadnyana (anggota MKKE) dari unsur BPK, Agus Surono (anggota MKKE) dari unsur profesi, serta Rusmin dan Lindawati Gani (anggota MKKE) dari unsur akademisi.

Pengambilan sumpah yang dilaksanakan pada sidang BPK tersebut dihadiri serta disaksikan oleh pimpinan BPK. Setelah pengambilan sumpah, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah Anggota MKKE BPK. ~

ASEAN MATTERS:  
 EPICENTRUM OF GROWTH

# Visi Indonesia Emas Jadi Panduan BPK Susun Renstra 2024-2029

PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN BPK TELAH MENDORONG PERBAIKAN KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN.



**K**etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yaton menyatakan Visi Indonesia Emas 2045 dan Pembangunan Berkelanjutan selalu menjadi pertimbangan BPK dalam menyusun rencana strategis (renstra) BPK. Ini juga menjadi langkah BPK untuk memperkuat integritas, independensi, profesionalisme serta budaya aparatur sipil negara BPK yang berakhlak.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK dalam rapat kerja (raker) pelaksana BPK 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (28/8/2023). Saat pembukaan Raker Pelaksana BPK 2023, Isma mengapresiasi seluruh pimpinan dan pelaksana BPK atas capaian pemeriksaan dan kelembagaan sampai saat ini. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, dan badan lainnya telah diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isma mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK telah mendorong perbaikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Itu tecermin dari perolehan opini hingga kewajaran laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas, turut berkontribusi dalam meningkatkan *public trust* dan *public accountability* atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, pimpinan badan atau lembaga lainnya.

Demikian pula dengan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk di dalamnya pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut turut memberikan kontribusi terhadap perbaikan kinerja, tata kelola upaya pemberantasan korupsi. "Capaian pemeriksanaan tersebut tentunya tidak terlepas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemerintah dan pimpinan entitas yang kita monitor bersama," kata Isma.

Isma menekankan, tindak lanjut merupakan bagian integral dalam proses pemeriksaan. "Hingga akhir semester II tahun 2022,

rekomendasi BPK yang telah selesai ditindaklanjuti mencapai 77,3 persen," kata Isma.

Ketua BPK mengingatkan, capaian ini harus terus ditingkatkan, sehingga pemeriksaan BPK terlihat manfaatnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Capaian pemeriksaan juga tidak terlepas dari capaian kelembagaan. Pada tahun 2022, realisasi anggaran BPK mencapai 99,6 persen dan mencapai peringkat pertama penyerapan anggaran tingkat kementerian lembaga.

Terkait pemeriksaan, Isma menyampaikan bahwa BPK pada semester II tahun ini akan melaksanakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan prioritas nasional, yakni untuk Program Prioritas Nasional 2 (PN2) terkait pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

BPK juga melakukan pemeriksaan atas PN4, yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dan penanganan stunting dalam rangka mengawal implementasi SDG's dan Pembangunan IKN. Pemeriksaan tersebut memerlukan sinergi, kolaborasi dan koordinasi lintas satker pemeriksaan maupun dukungan seluruh satker kesekjenan.

"Kemudian untuk tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 4,87 triliun, kita perlu memprioritaskan dan mengakselerasi kegiatan pemeriksaan maupun kelembagaan untuk menuntaskan pemeriksaan strategis secara menyeluruh atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Tahun 2024 juga adalah akhir dari rencana strategis BPK 2022-2024, maka target yang telah ditetapkan dan inisiatif strategis kelembagaan harus dapat dipenuhi," ucap dia.

la juga mengingatkan bahwa keterlibatan seluruh elemen BPK merupakan hal yang fundamental untuk meningkatkan *ownership*, komitmen, dan kontribusi nyata seluruh elemen BPK dalam implementasi Rencana Strategis.



*Lesson learned* dan hasil evaluasi atas Renstra perlu dilakukan untuk menentukan strategi yang masih relevan dengan kebutuhan dan tantangan pada tahun 2025 hingga 2029 maupun strategi yang perlu disesuaikan ataupun dihentika.

Dalam jangka pendek, perencanaan dan penganggaran untuk perencanaan kegiatan untuk tahun 2025 sudah harus dilaksanakan pada akhir 2023.

## TANTANGAN

Namun demikian, ungkap dia, terdapat tantangan sehubungan belum tersedianya RPJMN 2025-2029 dan Renstra BPK 2025-2029 yang akan menjadi referensi bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK 2025. Untuk itu, Isma menekankan perlunya mengelaborasi serta menindaklanjuti arahan pimpinan sebagai acuan sekaligus referensi bagi unit atau satuan kerja untuk merumuskan rancangan awal RKT BPK tahun 2025 sebagai dasar untuk menghitung proyeksi anggaran BPK di tahun 2025.

"Saya berharap, sumber daya keuangan yang diperoleh BPK dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif dan akuntabel dalam pemenuhan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan BPK," ucap dia.

Terkait penguatan fungsi investigatif, Isma menyebutkan bahwa hal ini dapat diwujudkan melalui sinergi internal, yakni melalui optimalisasi kerja antar AKN maupun perwakilan dengan AUI (Auditorat Utama Investigasi). Selain itu, dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan laboratoriu forensic maupun



sinergi eksternal dengan aparat penegak hukum (APH) melalui komunikasi berkelanjutan yang efektif.

Isma juga menekankan bahwa pendekatan integritas merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga reputasi dan kredibilitas BPK. Pelanggaran integritas terhadap kepercayaan publik dan mutu hasil pemeriksaan BPK merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi. "Seluruh elemen BPK, harus bergerak bersama untuk mendorong upaya efektivitas dalam menjaga integritas di BPK," ucap dia.

Isma turut mengingatkan agar seluruh insan BPK terus mendorong terwujudnya peningkatan dampak hasil pemeriksaan BPK. "Kita perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, baik melalui channel internal maupun eksternal. Kebijakan komunikasi melengkapi siklus akuntabilitas dan merupakan komponen penting dari independensi dan efisiensi melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif.

"Hasil pemeriksaan BPK seyogyanya juga sudah dapat menjadi rujukan dan referensi dalam penelitian akademik, sehingga dampak pemeriksaan BPK diharapkan dapat lebih nyata bagi penguatan tata pengelolaan keuangan negara yang mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ucap dia.

## MESIN PERUBAHAN BIROKRASI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Raker Pelaksana BPK mengatakan, BPK bisa menjadi mesin dari jalannya reformasi birokrasi. BPK juga bertanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat.

Azwar mengatakan, BPK sangat berperan mendorong agar anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah berdampak pada masyarakat.

"Saya berharap BPK punya terobosan-terobosan baru lagi, termasuk proses bisnis audit yang ke depan saya kira ini akan bisa lebih baik," ungkap dia.

Azwar menekankan, inovasi proses pemeriksaan penting untuk terus dilakukan karena sesuai dengan grand design reformasi birokrasi, Indonesia mengarah kepada *digital bureaucracy* yang di mencakup transformasi digital, *digital culture*, dan *digital competency*.

"Ke depan Kemenpan RB secara bertahap mendorong kepada sistem pemerintah berbasis elektronik. Pembentasan korupsi akan lebih efektif jika SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik)-nya jalan," ucapnya.

#### **KOLABORASI BPK DAN APH**

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengapresiasi kerja sama atau kolaborasi yang terjalin antara KPK dan BPK. KPK dan BPK selalu

berkolaborasi untuk mengetahui langkah dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara termasuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi.

"Pengelolaan keuangan negara harus mempunyai manfaat yang penting untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. BPK sebagai badan yang menjalankan tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, harus bisa menjamin mutu dari hasil pemeriksaan keuangan negara," kata Firli.

Untuk mengelola keuangan negara yang bersih dan transparan, diperlukan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi harus dipegang teguh dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara. ~



ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM OF GROWTH



# Implementasi Kebijakan Standar Audit (SA-700 Revisi 2021)

dalam Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan  
Atas Laporan Keuangan dengan Peraturan  
Badan Pemeriksa Keuangan Negara No 1. Tahun 2017  
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

---



**YENI ELFIZA ABBAS**  
PEMERIKSA SUBAUDITORAT  
KEUANGAN NEGARA V. A.2  
DAN DOSEN MAGISTER  
AKUNTANSI SEKOLAH  
TINGGI ILMU EKONOMI  
SWADAYA

**STANDAR AUDIT (SA) INI MENGATUR TENTANG TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MERUMUSKAN SUATU OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN. SA INI JUGA MENGATUR BENTUK DAN ISI LAPORAN AUDITOR YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN.**



**KARSAM**  
DOSEN MAGISTER  
AKUNTANSI SEKOLAH  
TINGGI ILMU EKONOMI  
SWADAYA

**A**uditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan Pemeriksaan atas nama BPK RI, mengikuti aturan dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara No.1 Tahun 2017. SPKN BPK RI mengadopsi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan International Standar Audit. Sesuai perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2021 yang mengalami perubahan atas Standar Audit atas SA 700, belum diberlakukan dalam SPKN 2017 yang sebelumnya mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA. Standar Audit 700 (Revisi 2021), yang memuat Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan, ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik I (DSPAP I) yang berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.

Paragraf 40(b) dari SA 700 (Revisi 2021) mengatur Audit atas laporan keuangan entitas selain emiten, maka auditor tidak perlu mencantumkan paragraf pada bagian Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan berupa "Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait."

Namun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) No. 1 Tahun 2017 masih mencantumkan paragraf tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

SA 700 (Revisi 2021) paragraf 40(c) menjelaskan bahwa mengatur pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen, maka untuk audit atas laporan keuangan selain entitas tersebut, auditor menyesuaikan LAI dengan tidak perlu mencantumkan susunan kata pada paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" sebagai berikut dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan



**BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.**

perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut. Artikel ini akan dijelaskan perubahan struktur Laporan Auditor Independen berdasarkan SA 700 (Revisi 2021). Paparan juga mencakup penjelasan tentang hal utama dan ilustrasi dari laporan auditor yang baru tersebut. Perbedaan struktur opini lama dengan struktur opini baru bisa dilihat dibawah ini:

#### Struktur lama:

- Belum memuat hal audit utama atau *key audit matters* (KAMs)
- Opini auditor terletak di bagian tengah laporan, setelah pernyataan tanggung jawab manajemen dan auditor

#### Struktur baru:

- Pengkomunikasian hal audit utama/KAMs
- Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI
- Pernyataan eksplisit di bagian basis opini tentang ketentuan independensi dan etika
- Kelangsungan usaha sebagai fokus tambahan
- Memperluas tanggung jawab manajemen termasuk TCWG



No	Pemeriksaan oleh BPK dan KAP atas nama BPK	No. LHP	Nama Entitas yang diperiksa	SPKN No.1 Tahun 2017	SA 700 revisi 2021
1	Junaedi, Chairul dan Rekan	Laporan No.: 00079/2.1202/AU.5/11/0804-1/1/IV/2022	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Belum memuat hal audit utama atau <i>key audit matters</i> (KAMs). Opini auditor terletak di bagian tengah laporan, setelah pernyataan tanggung jawab manajemen dan auditor	Pengomunikasian hal audit utama/KAMs. Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI. Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI. Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI. Pernyataan eksplisit di bagian basis opini tentang ketentuan independensi dan etika
2	BPK	34.A/LHP/XVIII/05/2022, 23 Mei 2022	Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2021		
3	BPK	35.A/LHP/XVIII/05/2022, 23 Mei 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021		
4	BPK	33.A/LHP/XVIII/05/2022, 23 Mei 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2021		
5	BPK	4.a/HP/XIX/05/2022 Tanggal : 24 Mei 202	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2021		
6	KAP Basyiruddin & Rekan	15.A/LHP/XIX. MAN/05/2022, 12 Mei 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong di AIMAS		
7	KAP Sukardi Hasan & Rekan	09.A/LHP/XIX. MAM/05/2022, 20 Mei 2022	LHP Kabupaten Majene		

Sedangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara belum ada paragraf yang menjelaskan pengkomunikasian hal audit utama atau *key audit matters* (KAMs), opini diletakkan di akhir Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (3) dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 9 ayat (1), BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Laporan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai standar Pemeriksaan yaitu Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Namun Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Negara atas nama BPK, yang diambil sampel sebanyak 11 (sebelas) terdiri dari LHP Laporan Keuangan Kementerian sebanyak 3 (tiga), satu LHP Badan dan 3 (tiga) LHP LKPD. Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan belum mengimplementasikan SA 700 (revisi 2021) atas Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan, uraian dapat dilihat pada tabel 1. Hal ini menjadi perhatian bagi BPK untuk bisa mengikuti perkembangan standar audit yang baru.

#### **PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan.

Tujuan auditor adalah

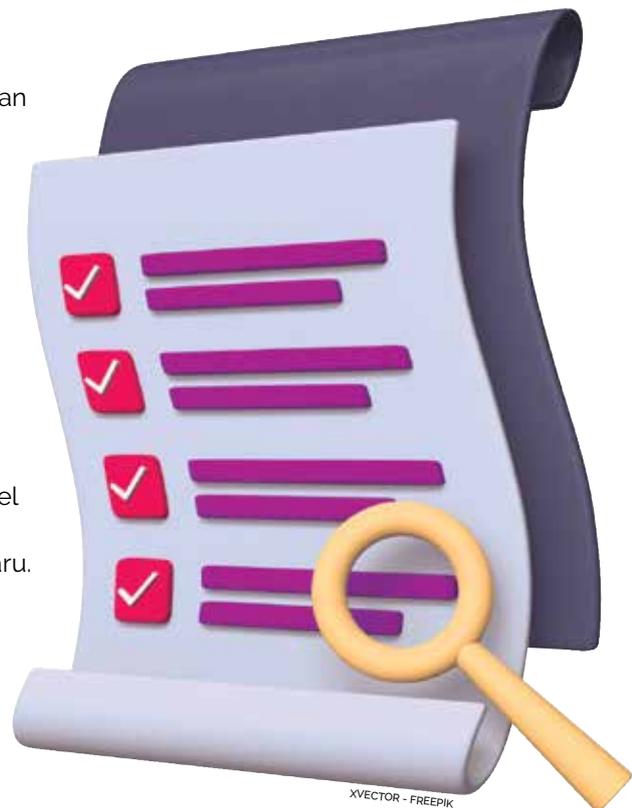
- Untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh; dan
- Untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis.

Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Ketika auditor:

- Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau
- Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material,

Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705 (Revisi 2021). SA 700 (Revisi 2021) berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. ~



” **Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**



**1-2**  
Ketua BPK Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2023.



1



2

**3**  
Audiensi Ketua BPK Isma Yatun dengan tim dan atlet soft tennis, 23 Agustus 2023.



3



4



5

**4-5**  
Seminar CSFA dihadiri oleh Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, dan Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 24 Agustus 2023.

**6-7**  
Ketua BPK Isma Yatun menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2023.



6



7



**8**  
Penyerahan LHP KPU RI oleh Anggota I/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, 3 Agustus 2023.



**9-11**  
Rapat Konsultasi Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing dan Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan BAKN, 30 Agustus 2023.



**12-13**  
Salah satu aksi Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi dalam pementasan Ketoprak Tari Retno Dumilah yang digelar di Teater Besar Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, 25 Agustus 2023.



**14**  
Sidang Promosi Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit di Universitas Merdeka Malang, 9 Agustus 2023.

**15**  
Pertemuan Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang dengan Rektor Universitas Pattimura, 23 Agustus 2023.



**16**  
*Courtesy meeting* Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan Mind ID & PT Antam, 22 Agustus 2023.

**17**  
Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo menghadiri *courtesy meeting* dengan SKK Migas, 22 Agustus 2023.

**18**  
*Courtesy meeting* Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan Dirut Bank BTN, 25 Agustus 2023.



Pada *Warta Pemeriksa* Edisi Juli 2023 disampaikan bahwa transisi energi telah menjadi agenda utama banyak negara, termasuk Indonesia.

Terkait hal tersebut, apakah tantangan dalam menjalankan agenda tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email [wartapemeriksa@bpk.go.id](mailto:wartapemeriksa@bpk.go.id) dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



ASEAN  
INDONESIA  
2023 

# ASEAN MATTERS: EPICENTRUM OF GROWTH

DIRGAHAYU  
REPUBLIK  
INDONESIA



ASEAN  
INDONESIA  
2023



TERUS  
MELAJU  
UNTUK  
INDONESIA  
MAJU



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri